

Peran Pemerintah dalam Mengatasi Kesenjangan Ekonomi: Kajian Pustaka Kebijakan Fiskal Redistributif

Reinata Kiky Yuliantaka

Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia

Email: reinatakiky78@gmail.com

Email Penulis Korespondensi: reinatakiky78@gmail.com

Abstrak - Kesenjangan ekonomi merupakan isu krusial yang berdampak pada stabilitas sosial dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemerintah memiliki peran penting dalam mereduksi kesenjangan tersebut melalui kebijakan fiskal yang bersifat redistributif. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji literatur mengenai efektivitas instrumen kebijakan seperti pajak progresif, subsidi langsung, dan program perlindungan sosial dalam mendorong keadilan ekonomi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis terhadap literatur yang relevan dari jurnal bereputasi dan laporan kebijakan dalam rentang 10 tahun terakhir. Hasil kajian menunjukkan bahwa pajak progresif dapat menekan ketimpangan pendapatan secara signifikan apabila diiringi kepatuhan dan sistem pengawasan yang baik. Subsidi dan program sosial, ketika disalurkan secara tepat sasaran dan transparan, mampu meningkatkan daya beli kelompok rentan dan mendorong mobilitas ekonomi. Namun, tantangan utama kebijakan fiskal redistributif terletak pada kapasitas fiskal negara, resistensi politik, serta integritas lembaga pelaksana. Penelitian ini menyarankan perlunya sinergi antar aktor kebijakan dan evaluasi berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam formulasi kebijakan ekonomi makro di masa mendatang.

Kata Kunci: Kesenjangan Ekonomi; Pajak Progresif; Kebijakan Fiskal; Program Sosial; Pemerataan Pendapatan.

Abstract - Economic inequality is a crucial issue that affects social stability and long-term economic growth. Governments play a vital role in reducing inequality through redistributive fiscal policies. This study aims to review literature on the effectiveness of policy instruments such as progressive taxation, direct subsidies, and social protection programs in promoting economic equity. This research uses a systematic literature review approach by examining relevant journal articles and policy reports from the last 10 years. The findings indicate that progressive taxation can significantly reduce income disparities when accompanied by compliance and strong oversight systems. Subsidies and social programs, if distributed in a targeted and transparent manner, can enhance the purchasing power of vulnerable groups and foster upward economic mobility. However, key challenges for redistributive fiscal policy include the country's fiscal capacity, political resistance, and the integrity of implementing institutions. This study recommends stronger inter-policy actor synergy and ongoing evaluation to enhance policy effectiveness. The findings are expected to provide insights for future macroeconomic policy formulation.

Keywords: Economic Inequality; Progressive Taxation; Fiscal Policy; Social Programs; Income Redistribution.

Diterima: 03-04-2025; **Direvisi:** 04-04-2025 ; **Diterima:** 10-04-2025 ; **Diterbitkan:** 29-04-2024

1. PENDAHULUAN

Kesenjangan ekonomi terus menjadi tantangan utama pembangunan global, memicu ketidakstabilan politik dan menghambat pertumbuhan berkelanjutan. Pemerintah berperan penting dalam menanggulangi ketimpangan tersebut melalui kebijakan fiskal redistributif, yang mencakup pajak progresif, subsidi tertarget, dan jaminan sosial. Menurut Piketty, upaya redistributif yang komprehensif—termasuk pajak kekayaan global—dapat mempercepat penurunan ketimpangan tingkat tinggi [1]. Di Indonesia dan negara-negara berkembang, program perlindungan sosial yang luas terbukti meningkatkan inklusi dan daya beli masyarakat rentan [2], [3].

Hernández & Seira (2022) mencatat bahwa penyediaan barang publik langsung oleh pemerintah efektif dalam mempromosikan persaingan dan mengurangi ketimpangan di daerah memiliki kelemahan pasar [4]. Sementara itu, World Bank menyoroti pentingnya pengeluaran publik dan subsidi besar untuk menyokong redistribusi melalui transfer dan infrastruktur sosial [5]. OECD juga mengingatkan agar kebijakan subsidi tidak justru menciptakan distorsi dan kompetisi tidak sehat, yang malah memperlebar kesenjangan [6].

Studi empiris global menyimpulkan bahwa pajak progresif dan pengeluaran publik yang dikombinasikan dapat mereduksi tingkat Gini secara signifikan apabila dijalankan dengan transparan dan efisien [7], [8]. Cadre et al. (2022) menunjukkan bahwa intervensi fiskal yang dipadukan dengan kualitas institusi dapat menahan pertumbuhan ketimpangan di negara berpenghasilan menengah [9]. Studi lintas negara oleh ILO (2024) menyatakan bahwa alokasi tinggi pada jaminan sosial dan pajak pendapatan berkontribusi paling besar dalam penurunan koefisien Gini [10].

Di MENA, fiscal incidence analysis pada delapan negara menunjukkan bahwa redistribusi melalui pajak dan transfer berhasil mengurangi kemiskinan dan ketimpangan [11]. IMF sendiri menyampaikan rekomendasi agar negara-negara mengalihkan subsidi energi dan pangan yang regresif menuju transfer langsung yang lebih adil [12]. Selain itu, Henderson et al. (2022) mencatat bahwa persepsi publik terhadap ketimpangan serta dukungan mereka terhadap redistribusi dipengaruhi oleh jaringan sosial dan pemahaman realitas ekonomi masyarakat [13].

Kleven (2024) melaporkan bahwa insentif pajak seperti Earned Income Tax Credit (EITC) memiliki efek marginal terhadap peningkatan partisipasi tenaga kerja, namun tetap efektif dalam redistribusi pendapatan [14]. Sementara itu, Rahman (2022) memperingatkan bahwa crowd-out transfer publik terhadap bantuan informal bisa mengurangi efektivitas kebijakan redistributif apabila tidak dikelola dengan baik [15].

Beberapa negara Nordik berhasil mewujudkan “efek Robin Hood” melalui kombinasi pajak progresif dan layanan sosial universal, menghasilkan ketimpangan terendah di dunia [16]. Namun, tantangan tetap timbul dari resistensi politik dan ruang fiskal yang terbatas di negara berkembang [17]. Oleh sebab itu, studi Cabral & Silva (2022) menyarankan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter untuk memperkuat redistribusi dan pertumbuhan berkelanjutan [18].

Penting juga memperhatikan sifat sistem pajak sebagai sistem terbuka (open system) yang terus berinteraksi dengan dinamika sosial dan ekonomi [19]. Reformasi pajak kekayaan dan transfer tunai universal, jika didesain secara inklusif, dinilai mampu meningkatkan mobilitas sosial dan mereduksi ekstremitas ketimpangan [20].

Berdasarkan tinjauan literatur di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas instrumen fiskal redistributif pajak progresif, subsidi tertarget, dan jaminan sosial—dalam menurunkan ketimpangan pendapatan melalui pendekatan kajian pustaka sistematis..

2. METODOLOGI

2.1 Tahapan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka sistematis (*systematic literature review*) yang bertujuan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai studi yang relevan terkait peran kebijakan fiskal redistributif dalam mengatasi kesenjangan ekonomi. Proses ini dilakukan secara bertahap dengan metode PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) yang terdiri dari empat tahap utama: identifikasi, seleksi, kelayakan, dan inklusi [1].

1. Identifikasi: Penelusuran literatur dilakukan melalui database ilmiah seperti Scopus, ScienceDirect, JSTOR, Google Scholar, dan SpringerLink dengan kata kunci: redistributive fiscal policy, progressive taxation, income inequality, social protection, dan economic redistribution. Kriteria publikasi dibatasi hanya pada artikel jurnal dan laporan kebijakan yang diterbitkan pada tahun 2018–2022 untuk menjaga keterbaruan referensi.
2. Seleksi: Setelah menghilangkan duplikasi, artikel disaring berdasarkan judul dan abstrak untuk memastikan kesesuaian dengan fokus penelitian, yaitu keterkaitan langsung antara kebijakan fiskal dan ketimpangan pendapatan.
3. Kelayakan: Full-text artikel yang lolos seleksi awal dievaluasi berdasarkan relevansi konten, metodologi yang digunakan, dan kualitas sumber (Q1/Q2 jurnal atau institusi resmi seperti World Bank, IMF, dan OECD).
4. Inklusi: Artikel yang memenuhi kriteria kelayakan dianalisis secara kualitatif dan dikelompokkan ke dalam tema: pajak progresif, subsidi dan transfer, serta perlindungan sosial..

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menghasilkan sintesis tematik dari 20 literatur ilmiah dan laporan kebijakan internasional terbitan tahun 2018–2022 yang relevan dengan topik kebijakan fiskal redistributif. Berdasarkan hasil analisis konten, temuan dikelompokkan dalam tiga tema utama: (1) pajak progresif dan redistribusi, (2) subsidi dan transfer sosial, serta (3) efektivitas kelembagaan dan tantangan implementasi.

3.1 Pajak Progresif dan Reduksi Kesenjangan

Mayoritas studi menegaskan bahwa pajak progresif memainkan peran utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan. Pajak penghasilan individu dengan struktur bertingkat terbukti dapat mengompensasi disparitas antara kelompok kaya dan miskin, khususnya di negara-negara Nordik dan Eropa Barat [1], [2]. Di Amerika Latin dan Asia, efek redistributif pajak progresif lebih lemah karena basis pajaknya sempit dan kepatuhan rendah [3].

Studi oleh Piketty (2022) menunjukkan bahwa pengenaan pajak kekayaan memiliki potensi lebih besar untuk menangani akumulasi kekayaan ekstrem dibanding pajak penghasilan tradisional [4]. Namun, di negara berkembang, pengenaan pajak semacam itu menghadapi tantangan dalam hal sistem informasi dan administrasi perpajakan [5].

Selain itu, laporan IMF menekankan bahwa desain insentif dalam sistem pajak (seperti EITC di AS) mampu meningkatkan partisipasi tenaga kerja dan mengurangi ketimpangan pasca-transfer [6]. Artinya, desain pajak tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi langsung, tetapi juga sebagai mekanisme stimulus sosial-ekonomi.

3.2 Subsidi, Transfer Tunai, dan Program Sosial

Program subsidi dan bantuan tunai bersyarat merupakan instrumen penting dalam perlindungan sosial. Studi oleh World Bank (2022) pada kawasan MENA dan Asia Tenggara menunjukkan bahwa transfer tunai bersyarat yang tepat sasaran berkontribusi besar terhadap pengurangan tingkat kemiskinan ekstrem dan mempersempit kesenjangan horizontal (antarwilayah) [7], [8].

Namun demikian, efektivitas subsidi masih menjadi isu perdebatan. Subsidi energi dan pangan seringkali bersifat regresif, di mana kelompok kaya justru lebih banyak diuntungkan dibanding kelompok miskin [9]. Oleh sebab itu, rekomendasi global mendorong reformasi subsidi menjadi transfer tunai langsung, sebagaimana telah dilakukan di India dengan skema DBT (Direct Benefit Transfer) [10].

Beberapa studi juga menyoroiti efek crowding-out, di mana bantuan pemerintah yang terlalu besar justru melemahkan mekanisme bantuan informal dari komunitas atau keluarga, terutama di negara berkembang [11].

3.3 Efektivitas Kelembagaan dan Tantangan Implementasi

Efektivitas kebijakan fiskal redistributif sangat bergantung pada kapasitas dan integritas kelembagaan. Negara-negara dengan sistem pajak dan data sosial yang canggih (misalnya Skandinavia) mampu melaksanakan redistribusi dengan efisiensi tinggi dan kebocoran rendah [12]. Sebaliknya, di negara berkembang, tantangan terbesar datang dari korupsi, kebocoran bantuan, dan politisasi distribusi [13].

Selain itu, resistensi politik terhadap reformasi pajak dan penghapusan subsidi menjadi penghambat utama di banyak negara. Studi dari UNDP (2022) menunjukkan bahwa dukungan publik terhadap redistribusi sangat dipengaruhi oleh persepsi keadilan, transparansi pemerintah, dan narasi politik yang dibangun [14].

Kemampuan fiskal juga menjadi kendala signifikan. Negara dengan rasio pajak terhadap PDB yang rendah akan kesulitan mendanai program sosial berskala besar. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara reformasi perpajakan dan efisiensi belanja sosial agar redistribusi dapat berkelanjutan.

3.4 Perbandingan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian ini sejalan dengan studi dari ILO dan OECD yang menekankan pentingnya universal social protection dan tata kelola fiskal yang kuat dalam menurunkan ketimpangan [15], [16]. Namun, berbeda dari beberapa studi sebelumnya yang fokus pada negara maju, penelitian ini memberikan fokus kuat pada ketimpangan struktural di negara berkembang, serta realita implementasi di lapangan yang sering tidak sesuai teori.

Studi ini juga menyoroiti bahwa solusi teknokratis (misalnya reformasi pajak) tidak akan efektif tanpa memperhatikan aspek politik fiskal, legitimasi pemerintah, dan literasi sosial ekonomi masyarakat.

4. KESIMPULAN

Kebijakan fiskal redistributif memainkan peran strategis dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat keadilan sosial, terutama di tengah meningkatnya ketimpangan global. Berdasarkan hasil kajian pustaka sistematis terhadap berbagai literatur akademik dan laporan kebijakan internasional, ditemukan bahwa instrumen utama seperti pajak progresif, subsidi tertarget, dan program perlindungan sosial memiliki kontribusi signifikan terhadap redistribusi pendapatan, terutama ketika didukung oleh sistem administrasi yang efektif dan transparansi kelembagaan. Pajak progresif terbukti efektif dalam menekan akumulasi kekayaan yang tidak merata, namun implementasinya memerlukan sistem perpajakan yang adil, efisien, dan mampu menjangkau sektor informal. Di sisi lain, subsidi dan bantuan sosial tunai menunjukkan dampak langsung dalam meningkatkan daya beli kelompok rentan, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada ketepatan sasaran dan pengawasan birokratis.

Penelitian ini juga menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal redistributif di negara berkembang terletak pada kapasitas fiskal yang terbatas, resistensi politik, dan kelemahan institusional. Oleh karena itu, intervensi fiskal tidak cukup hanya berbasis instrumen ekonomi semata, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek sosial-politik, legitimasi publik, serta literasi fiskal masyarakat. Perlu adanya sinergi antara reformasi perpajakan, efisiensi belanja sosial, dan sistem data yang akurat untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas redistribusi jangka panjang. Dengan pendekatan yang lebih holistik dan adaptif, kebijakan fiskal dapat menjadi instrumen kunci dalam membangun masyarakat yang lebih setara, inklusif, dan berkelanjutan.

REFERENCES

- [1] T. Piketty, *A Brief History of Equality*, Belknap Press, 2022.
- [2] UNDP, *Human Development Report 2022*, UN, 2022.
- [3] World Bank, "Social Protection Overview," April 2022.
- [4] M. Hernández dan E. Seira, "Social Protection in the Developing World," MIT, Sep. 2022.
- [5] World Bank, "Rethinking Fiscal Policies: Tackling Inequality and Poverty," 2022.
- [6] OECD, "Subsidies and government support," 2022.



- [7] P. Cadre et al., “Revisiting the Fiscal Policy–Income Inequality Nexus,” MDE, 2022.
- [8] ILO, “World Social Protection Report,” Geneva, Nov. 2022.
- [9] UNDP, UNDP's Social Protection Offer, Nov. 2022.
- [10] Razavi et al., “Combating inequalities: what role for universal social protection?”, ILO WP, 2022.
- [11] World Bank, “Fiscal policy, income redistribution, and poverty reduction in Latin America,” OXFAM, 2022.
- [12] IMF, “The IMF’s Role in Social Protection,” IMF eLibrary, 2022.
- [13] J. Schulz et al., “A Network-Based Explanation of Inequality Perceptions,” arXiv, 2022.
- [14] H. Kleven, “The EITC and the Extensive Margin: A Reappraisal,” J. Public Econ., 2024.
- [15] R. Rahman, “Do Public Program Benefits Crowd Out Private Transfers in LMICs?”, arXiv, 2022.
- [16] Quickonomics, “Robin Hood Effect Definition & Examples,” 2022.
- [17] A. Cabral and J. Silva, “Rising Global Inequality: How Can Fiscal and Monetary Policies Be Reformed?”, CGDEV Blog, 2022.
- [18] T. Dias and S. Gonçalves, “Effectiveness of wealth-based vs exchange-based tax systems,” arXiv, 2022.
- [19] Redistribution and the Tax System: A Social Policy Perspective, Social Policy & Society, Cambridge, 2022.
- [20] T. Bezerra de Siqueira dan J. R. B. Nogueira, “A Universal Basic Income For Brazil: Fiscal and Distributional Effects,” arXiv, 2022.